

# Bahasa Hak Istimewa dan Krisis Legitimasi: Analisis Wacana Kritis atas Kontroversi Tunjangan Perumahan DPR 2025

Andi Sahtiani Jahrir<sup>1</sup>, Muhammad Tahir<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Makassar

Penulis Korespondensi:

**Andi Sahtiani Jahrir**

[andisahtianijahrir@unm.ac.id](mailto:andisahtianijahrir@unm.ac.id)

## Abstrak

Kontroversi tunjangan perumahan DPR tahun 2025 memicu krisis legitimasi nasional yang tidak hanya bersumber dari substansi kebijakan, tetapi terutama dari performativitas linguistik para legislator. Studi ini menganalisis bagaimana strategi retorika—normalisasi, minimisasi, dan legitimasi digunakan dalam ujaran publik anggota DPR, serta bagaimana strategi tersebut gagal ketika bertemu dengan ekologi media dan model mental publik. Menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) Fairclough yang dipadukan dengan model sosiokognitif van Dijk, penelitian ini mengkaji lima ujaran legislator yang viral, liputan media, serta artefak digital seperti meme, potongan video, komentar warganet, dan tagar kritik. Temuan menunjukkan bahwa pilihan leksikal seperti hanya, wajar, kompensasi, dan hak berfungsi menormalkan privilese namun justru dibaca publik sebagai arogansi moral di tengah krisis ekonomi. Media arus utama dan media sosial memperkuat delegitimasi melalui reframing, viralitas klip pendek, serta produksi satir dan meme yang menggeser makna dari entitlement menjadi greed. Pada level makro, wacana ini membentuk konflik simbolik antara elite dan rakyat, menempatkan DPR sebagai aktor yang tidak peka terhadap penderitaan publik. Analisis sosiokognitif memperlihatkan bahwa reaksi publik dipengaruhi oleh skema ketidakadilan, memori skandal politik, dan afek kolektif. Studi ini menyimpulkan bahwa legitimasi politik dalam era politik yang termediasasi sangat ditentukan oleh kesesuaian antara bahasa elite dan model mental publik; ketika keduanya tidak selaras, delegitimasi multisitus muncul dengan cepat, viral, dan masif.

**Kata kunci:** *analisis wacana kritis, delegitimasi, bahasa hak istimewa, politik selebritas, model mental publik, anggota DPR*

## Pendahuluan

Pada Agustus 2025, Indonesia diguncang oleh kontroversi besar setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui tunjangan perumahan senilai sekitar Rp50 juta per bulan bagi seluruh anggotanya. Kebijakan ini, yang secara resmi dibingkai sebagai langkah efisiensi untuk menggantikan rumah dinas, dengan cepat memicu gelombang protes nasional. Pada masa ketika inflasi meningkat, biaya hidup naik, dan ketidaksetaraan ekonomi semakin menonjol, keputusan tersebut dipersepsi publik bukan sebagai kebijakan administratif, melainkan sebagai bentuk privilese berlebihan di tengah krisis sosial-ekonomi. Reaksi keras masyarakat tercermin dalam demonstrasi yang meluas, bentrokan yang berujung kekerasan, serta tuntutan publik untuk mencopot sejumlah legislator yang dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat (Reuters, 2025; Tempo, 2025).

Namun, substansi kebijakan hanyalah satu aspek dari krisis legitimasi ini. Faktor yang jauh lebih menentukan adalah wacana yang digunakan para legislator untuk membenarkan tunjangan tersebut. Kontroversi menjalar menjadi krisis nasional bukan semata karena nilai Rp50 juta per bulan, tetapi karena cara para elite berbicara tentang tunjangan tersebut. Pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan untuk merasionalisasi kebijakan justru ditafsirkan publik sebagai arogan, tidak membumi, teknokratis, dan mencerminkan keterputusan antara elite dan rakyat.

Salah satu pernyataan paling viral datang dari Wakil Ketua DPR Adies Kadir, yang menyatakan bahwa “Rp50 juta per bulan hanya Rp2,5 juta per hari kerja.” Maksudnya adalah menormalisasi angka besar tersebut melalui penghitungan harian. Namun, framing matematis ini justru dibaca publik sebagai upaya mengecilkan dampak finansial yang luar biasa besar bagi masyarakat umum. Media melabelinya sebagai ngawur, sementara warganet menjadikannya bahan satir dan meme yang membandingkan tunjangan DPR dengan upah minimum buruh harian.

Pernyataan benada defensif juga disampaikan Ahmad Sahroni, yang menegaskan bahwa tunjangan tersebut “sudah diatur.” Justifikasi legalistik ini, alih-alih menenangkan publik, dibaca sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab moral. Sementara itu, para politikus selebritas yang baru memasuki DPR—Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya—justru memperkuat kemarahan publik melalui pembelaan yang dianggap naif, tidak sensitif, atau bahkan memamerkan mental entitlement. Nafa Urbach menyebut tunjangan itu “wajar karena tidak ada rumah dinas,” Eko Patrio menyebutnya “hanya kompensasi,” dan Uya Kuya secara eksplisit menyatakannya sebagai “hak” anggota DPR.

Rangkaian pernyataan ini beredar luas di berbagai platform media arus utama dan media sosial, menghasilkan spiral reaksi publik yang intens. Meme, parodi, komentar satir, hingga tagar kritik terus bermunculan, memperkuat persepsi bahwa para legislator gagal memahami realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, krisis ini bukan semata krisis kebijakan, melainkan krisis legitimasi yang dipicu oleh performativitas linguistik para elite politik.

Dinamika ini menunjukkan bahwa dalam politik modern yang semakin termediatisasi, bahasa adalah arena pertarungan legitimasi. Ujaran elite bukan hanya deskripsi kebijakan, melainkan tindakan sosial yang membentuk persepsi publik, mengonstruksi batas moral, dan menentukan apakah suatu kebijakan diterima atau ditolak. Ketika ujaran-ujaran tersebut tidak selaras dengan model mental publik—seperti ekspektasi empati, kepekaan, dan rasa keadilan—bahasa justru menjadi pemicu delegitimasi, memobilisasi protes, dan menguatkan sentimen anti-elite.

Kerangka ini selaras dengan pijakan teoritis yang ditawarkan oleh Analisis Wacana Kritis (AWK). Fairclough (1995) memandang wacana sebagai praktik sosial yang melibatkan tiga dimensi—teks, praktik diskursif, dan praktik sosial—yang berkelindan membentuk relasi kekuasaan. Melalui analisis terhadap pemilihan kata, metafora, modalitas, dan struktur argumentatif, AWK menyingkap bagaimana bahasa bekerja untuk melegitimasi atau menormalkan ketimpangan. Sementara itu, model sosiokognitif van Dijk (2008) memfokuskan pada bagaimana wacana diproduksi, diedarkan, dan diproses berdasarkan skema kognitif serta ideologi yang ada dalam masyarakat. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih utuh terhadap bagaimana ujaran elite berinteraksi dengan pengetahuan sosial dan model mental publik hingga menghasilkan delegitimasi.

Literatur kontemporer menunjukkan bahwa strategi retorika elit kerap beroperasi melalui tiga mekanisme kunci: normalisasi, minimisasi, dan legitimasi. Normalisasi berupaya membingkai privilese luar biasa sebagai sesuatu yang biasa (Schäfer, 2024).

Minimisasi mengecilkan signifikansi isu untuk menurunkan persepsi ancaman (Bates, 2023). Legitimasi menyerukan otoritas hukum atau moral untuk membenarkan praktik tertentu (Said, 2024). Ketiganya tampak jelas dalam pernyataan para legislator Indonesia, namun gagal total karena bertabrakan dengan kondisi sosial, sensitivitas publik, serta ekologi media digital yang memperkuat kritik dan satir.

Satu elemen penting yang membedakan polemik ini dari kontroversi kebijakan lainnya adalah keterlibatan politikus selebritas. Studi tentang politik selebritas menunjukkan bahwa figur populer membawa dua efek: peningkatan visibilitas dan peningkatan kerentanan (Allen, 2023; Abidin, 2025; Peterson, 2024). Identitas mereka sebagai entertainer membuat publik menilai performa politik mereka dengan standar yang berbeda dan lebih keras. Dalam kasus tunjangan perumahan DPR, respon terhadap Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya lebih intens dan lebih satir dibandingkan respons terhadap politikus karier. Meme yang mengaitkan persona artis dengan ucapan politik mereka memperbesar delegitimasi, memperlihatkan bagaimana identitas budaya populer dapat menjadi liabilitas dalam arena politik formal.

Ekologi media sosial memperkuat semua dinamika tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa media sosial meningkatkan intensitas kemarahan publik melalui logika viralitas, afek, dan polarisasi (Moffitt, 2024; Zhang, 2024). Dalam konteks Indonesia, tagar seperti #TolakTunjanganDPR dan meme tentang “Rp2,5 juta per hari” menunjukkan bagaimana kritik tidak hanya bersifat rasional tetapi juga emosional, afektif, dan kolektif. Konten satir yang beredar luas memproduksi apa yang disebut Rahimi (2024) sebagai delegitimasi multisitus, yaitu erosi legitimasi yang terjadi secara bersamaan di media arus utama, media sosial, percakapan publik, dan ruang politik formal.

Terlepas dari luasnya kajian internasional tentang wacana politik, delegitimasi, dan politik selebritas, penelitian yang menggabungkan ketiganya dalam konteks Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian tentang kontroversi tunjangan DPR 2025 sejauh ini lebih banyak bersifat deskriptif, tidak menelaah dimensi retorik maupun analisis wacana secara mendalam. Belum ada studi yang mengintegrasikan AWK Fairclough dengan model sosiokognitif van Dijk serta analisis identitas selebritas untuk memahami bagaimana bahasa hak istimewa dapat berubah menjadi katalis krisis politik.

Karena itu, studi ini berupaya menutup gap tersebut dengan menganalisis ujaran para legislator Indonesia selama kontroversi tunjangan perumahan melalui pendekatan AWK. Dengan fokus pada strategi retorika (normalisasi, minimisasi, legitimasi), perbedaan identitas politikus (karier vs selebritas), serta sirkulasi wacana dalam ekologi media, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana bahasa yang dimaksudkan untuk melegitimasi justru menghasilkan delegitimasi. Dengan demikian, studi ini memperlihatkan bagaimana performativitas linguistik elite, identitas personal, dan dinamika media berinteraksi membentuk krisis legitimasi dalam demokrasi Indonesia.

## **Method**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif interpretif berbasis Analisis Wacana Kritis (AWK) untuk mengkaji strategi diskursif para legislator Indonesia dalam membingkai tunjangan perumahan DPR tahun 2025 serta resepsi publik terhadap ujaran tersebut. Pendekatan AWK dipilih karena memandang bahasa sebagai praktik sosial yang mengembangkan dan mereproduksi relasi kuasa serta ideologi, sehingga sangat tepat digunakan untuk menelaah bagaimana retorika elite dapat membentuk atau meruntuhkan legitimasi politik. Desain penelitian bersifat eksploratif-komparatif karena

membandingkan strategi wacana politikus karier dan politikus selebritas, dua kelompok aktor yang memiliki modal simbolik dan ekspektasi publik yang berbeda dalam arena politik Indonesia.

### **Korpus dan Sumber Data**

Korpus penelitian mencakup lima ujaran yang disampaikan oleh anggota DPR dan menjadi fokus perdebatan publik selama kontroversi tunjangan perumahan 2025. Data diperoleh dari rekaman video (YouTube, Kompas TV, CNN Indonesia), liputan media nasional (Tempo, Kompas, Detik, CNBC Indonesia), liputan media internasional (Reuters, The Guardian), serta artefak digital seperti meme, tagar viral, komentar warganet, dan cuplikan percakapan di media sosial. Pendekatan multisumber ini memungkinkan penelusuran menyeluruh terhadap bagaimana wacana diproduksi, disirkulasikan, disunting, dan direframing oleh media dan publik dalam ekologi media yang kompleks.

### **Kriteria Seleksi Data**

Pemilihan data dilakukan melalui purposive sampling dengan mempertimbangkan empat kriteria: (1) ujaran harus berasal dari anggota DPR yang secara eksplisit membahas tunjangan perumahan; (2) pernyataan telah dipublikasikan dalam media arus utama atau platform digital yang dapat diverifikasi; (3) ujaran memicu respons publik yang luas dalam bentuk viralitas, pemberitaan, atau meme; dan (4) ujaran mewakili strategi wacana utama seperti normalisasi, minimisasi, dan legitimasi. Kriteria ini memastikan bahwa korpus penelitian terdiri atas data yang relevan, signifikan, dan berpengaruh terhadap dinamika krisis legitimasi.

### **Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi dan pelacakan ujaran legislatif yang viral, diikuti dengan transkripsi verbatim terhadap rekaman video yang relevan untuk memastikan akurasi linguistik. Berita daring, tajuk utama, fotografi media, dan konten media sosial dikumpulkan sebagai bagian dari dokumentasi praktik diskursif yang mengelilingi ujaran tersebut. Artefak digital seperti meme dan komentar publik disimpan untuk dianalisis sebagai bentuk rekontekstualisasi wacana. Seluruh data kemudian dihimpun dalam basis data tematik untuk memfasilitasi proses pengodean dan analisis.

### **Kerangka Analisis**

Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan model tiga dimensi Fairclough (1995) dan model sosiokognitif van Dijk (2008). Pada level mikro (teks), analisis fokus pada pilihan kata, metafora, modalitas, presuposisi, dan strategi retorik dalam ujaran elite. Pada level meso (praktik diskursif), penelitian mengkaji bagaimana media mengutip, memotong, atau menonjolkan bagian tertentu dari ujaran serta bagaimana publik memproduksi meme, parodi, atau komentar sebagai resistensi simbolik. Pada level makro (praktik sosial), analisis diarahkan pada ideologi, relasi kuasa, dan konflik simbolik antara elite dan rakyat dalam konteks krisis legitimasi. Model sosiokognitif digunakan untuk menelusuri bagaimana model mental publik dan skema kognitif terkait keadilan dan privilese memengaruhi resepsi terhadap ujaran tersebut.

### **Prosedur Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. *Pertama*, analisis mikro-linguistik untuk menelaah fitur bahasa yang digunakan para legislator dalam menormalkan atau

melegitimasi tunjangan. *Kedua*, analisis praktik diskursif untuk memetakan bagaimana ujaran diproduksi dan disirkulasikan dalam ekologi media. *Ketiga*, analisis level sosial-ideologis untuk memahami bagaimana wacana tersebut berinteraksi dengan struktur sosial, ketimpangan, dan sentimen publik. *Keempat*, analisis sosiokognitif untuk menjelaskan bagaimana publik mengonstruksi makna ulang terhadap istilah seperti *hak*, *wajar*, atau *kompensasi* melalui proses kognitif kolektif. Tahapan ini memastikan bahwa analisis tidak hanya menggambarkan teks, tetapi juga dinamika makna yang muncul dalam ruang politik dan mediatik.

### Validitas dan Pertimbangan Etis

Untuk menjaga validitas penelitian, triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan data dari video, berita, dan media sosial. Dependability dijaga melalui dokumentasi proses transkripsi dan pengodean dalam audit trail. Confirmability diperkuat dengan menyajikan kutipan langsung sebagai dasar interpretasi. Transferability dipertimbangkan dengan menyediakan deskripsi konteks yang jelas agar temuan dapat digunakan pada studi wacana politik lainnya. Seluruh data diambil dari ruang publik sehingga tidak menimbulkan pelanggaran etika, dan identitas subjek tidak diubah karena mereka merupakan figur publik dengan pernyataan yang telah terpublikasi secara luas.

### Hasil

Tabel 1. Temuan Level Mikro: Fitur Linguistik Ujaran Legislator

| Legislator    | Ujaran                                         | Jenis Aktor          |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Adies Kadir   | Rp50 juta per bulan hanya Rp2,5 juta per hari. | Politikus karier     |
| Ahmad Sahroni | Sudah diatur.                                  | Politikus karier     |
| Nafa Urbach   | Wajar karena tidak ada rumah dinas.            | Politikus selebritas |
| Eko Patrio    | Hanya kompensasi.                              | Politikus selebritas |
| Uya Kuya      | Itu hak.                                       | Politikus selebritas |

Analisis mikro menunjukkan bahwa para legislator menggunakan pola leksikon dan struktur retorika yang secara konsisten menempatkan tunjangan perumahan sebagai sesuatu yang normal, wajar, sah, atau tidak signifikan. Ujaran Adies Kadir, *Rp50 juta per bulan hanya Rp2,5 juta per hari*, mengandung strategi normalisasi numerik melalui minimisasi matematis. Kata hanya berfungsi sebagai perangkat retorik yang mereduksi beban finansial secara simbolik, sementara penghitungan *per hari* mengaburkan skala nilai yang jauh lebih besar. Secara linguistik, pilihan frasa ini memosisikan tunjangan sebagai entitas kecil dan administratif, bukan sebagai beban anggaran publik.

Ujaran Ahmad Sahroni, *Sudah diatur*, memanfaatkan strategi legitimasi legal. Kalimat deklaratif singkat ini mengandung presuposisi bahwa keberadaan regulasi otomatis membenarkan kebijakan tersebut. Penggunaan struktur pasif (*diatur*) menghapus aktor yang mengatur, sehingga mengalihkan tanggung jawab moral dari pembicara kepada entitas institusional yang tidak disebutkan.

Sementara itu, tiga politikus selebritas menampilkan pola linguistik yang berbeda. Nafa Urbach menggunakan frasa *wajar karena tidak ada rumah dinas*, yang mengandung strategi normalisasi struktural dengan menyajikan tunjangan sebagai konsekuensi logis dari perubahan fasilitas. Eko Patrio menggunakan frasa *hanya kompensasi*, menggambarkan tunjangan sebagai substitusi administratif yang netral. Uya Kuya menggunakan pernyataan paling kuat secara performatif, yaitu *Itu hak*, yang menempatkan tunjangan sebagai klaim moral sekaligus legal. Secara mikro-linguistik,

kata hak memiliki daya ilokusi tinggi karena mengandung implikasi keadilan, kepatutan, dan klaim normatif yang tidak boleh diganggu.

Temuan mikro memperlihatkan pola umum: para legislator membingkai tunjangan sebagai sesuatu yang natural, kecil, atau sah, tetapi pilihan bahasa tersebut justru bertentangan dengan persepsi publik tentang ketimpangan sosial dan krisis ekonomi.

Tabel 2. Analisis Mikro-Linguistik Ujaran Legislator

| Legislator    | Pilihan<br>Leksikal<br>Kunci               | Fitur Linguistik                                           | Strategi<br>Retoris     | Presuposisi/Implikatur                                                              | Efek Pragmatik                                                             |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Adies Kadir   | <i>hanya, Rp2,5 juta per hari</i>          | Normalisasi numerik; reduksi nilai dengan unit lebih kecil | Normalisasi + Minimasi  | Publik harus menerima bahwa nilai besar dapat dianggap kecil jika dihitung per hari | Mengaburkan skala tunjangan; menciptakan kesan hal administrasi biasa      |
| Ahmad Sahroni | <i>Sudah diatur</i>                        | Kalimat deklaratif; struktur pasif                         | Legitimasi Legal        | Ada aturan yang membenarkan tunjangan; hukum dianggap final                         | Mengalihkan tanggung jawab kepada regulasi; menghindari evaluasi moral     |
| Nafa Urbach   | <i>wajar, karena tidak ada rumah dinas</i> | Kausalitas sederhana; normalisasi struktural               | Normalisasi Struktural  | Kehilangan fasilitas otomatis memerlukan kompensasi besar                           | Meningkatkan tunjangan sebagai konsekuensi alami, bukan pilihan politik    |
| Eko Patrio    | <i>hanya kompensasi</i>                    | Minimasi; penyederhanaan                                   | Minimisasi              | Kompensasi adalah hal biasa, tidak perlu dipersoalkan                               | Menurunkan signifikansi isu; menyembunyikan beban anggaran                 |
| Uya Kuya      | <i>Itu hak</i>                             | Ilokusi deklaratif; absolutisme modal                      | Legitimasi Berbasis Hak | Anggota DPR berhak memperoleh tunjangan; hak ≠ dapat dipertanyakan                  | Menegaskan klaim normatif; memicu resistensi publik karena dianggap arogan |

Tabel 2. menunjukkan bahwa pilihan bahasa para legislator secara konsisten berfungsi mereduksi, menormalkan, atau melegitimasi tunjangan. Leksikon seperti hanya, wajar, kompensasi, dan hak digunakan untuk mengaburkan besarnya privilese dan mengalihkan tanggung jawab. Namun, strategi ini bertentangan dengan sensitivitas publik sehingga memicu penolakan dan mempercepat delegitimasi.

Tabel 3. Pola Umum Strategi Mikro-Linguistik

| Aspek Analisis                             | Temuan                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Leksikon Dominan                           | hanya, wajar, kompensasi, hak, diatur                                   |
| Modalitas                                  | kepastian tinggi (hak), normalisasi (wajar), minimasi (hanya)           |
| Struktur Sintaksis                         | deklaratif pendek; bentuk pasif; klausa kausal sederhana                |
| Presuposisi                                | tunjangan adalah: normal, sah, wajib, atau akibat struktural            |
| Implikatur                                 | publik seharusnya memahami tunjangan sebagai hal teknis                 |
| Fungsi Wacana                              | mereduksi resistensi, mengalihkan tanggung jawab, menormalkan privilese |
| Ketidaksesuaian dengan Model Mental Publik | publik membaca kata-kata ini sebagai tanda arogansi, bukan justifikasi  |

Tabel 3 memperlihatkan bahwa pada level mikro, para legislator menggunakan pola bahasa yang secara konsisten bertujuan menormalkan, menyederhanakan, dan

melegitimasi tunjangan perumahan. Leksikon seperti hanya, wajar, kompensasi, hak, dan diatur menunjukkan upaya untuk membingkai tunjangan sebagai sesuatu yang kecil, natural, atau sah secara hukum. Pilihan modalitas yang cenderung pasti dan absolut (misalnya hak) memperkuat klaim normatif bahwa tunjangan tersebut tidak seharusnya diperdebatkan.

Secara sintaksis, penggunaan kalimat pendek, bentuk pasif, dan klausa kausal sederhana membantu menciptakan kesan bahwa pernyataan mereka bersifat faktual dan administratif, bukan politis. Presuposisi dan implikatur yang muncul menunjukkan bahwa para legislator mengasumsikan publik akan menerima tunjangan sebagai konsekuensi struktural atau ketentuan legal, bukan tindakan privilege. Namun, pola mikro-linguistik ini bertentangan dengan model mental publik yang sedang sensitif terhadap isu ketimpangan. Akibatnya, strategi retorik yang dimaksudkan untuk meredakan kritik justru memicu resistensi dan memperkuat persepsi arogansi. Dengan demikian, Tabel 2 menunjukkan bahwa kegagalan legitimasi berakar pada ketidakcocokan antara bahasa elite dan ekspektasi moral publik.

## 2. Temuan Level Meso: Produksi, Sirkulasi, dan Rekontekstualisasi Media

Analisis level meso menunjukkan bahwa media memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi ujaran-ujaran tersebut menjadi objek kritik kolektif. Headline media nasional seperti *Ujaran ngawur Adies Kadir, Tunjangan DPR tidak tepat di tengah krisis, atau Netizen marah: Hanya Rp2,5 juta per hari?* menunjukkan bagaimana media melakukan reframing terhadap strategi normalisasi dan legitimasi para legislator. Cuplikan video diperpendek menjadi potongan yang menonjolkan bagian paling kontroversial, menciptakan efek viral yang mempengaruhi persepsi publik.

Di media sosial, rekontekstualisasi berlangsung lebih intens dan bernuansa satir. Meme yang membandingkan *Rp2,5 juta per hari* dengan upah buruh harian atau gaji guru memperkuat persepsi ketimpangan. Kata *hak* dari pernyataan Uya Kuya menjadi simbol yang sering diparodikan, misalnya dengan format *Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin*, menunjukkan transformasi makna melalui humor dan kritik. Tagar seperti #TolakTunjanganDPR, #Ngawur50Juta, dan #DPRPuraPuraTidakTahu menjadi ruang digital bagi publik untuk menegosiasikan ulang makna ujaran elite. Melalui proses sirkulasi media, ujaran-ujaran tersebut tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang arogansi elite, ketidakpekaan, dan ketamakan. Temuan meso memperlihatkan bahwa media berperan sebagai aktor yang memperkuat delegitimasi, bukan sekadar pelapor.

Tabel 4 Temuan Level Meso Produksi, sirkulasi, rekontekstualisasi Media

| Aspek Meso                | Temuan Utama                                                                  | Contoh                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Produksi Media            | Media mengemas ulang ujaran dengan sudut kritik dan dramatisasi               | <i>Ujaran Ngawur Adies Kadir, Tunjangan DPR Tidak Tepat di Tengah Krisis</i> |
| Sirkulasi Potongan Video  | Bagian paling kontroversial dipotong menjadi klip pendek sehingga mudah viral | Klip 10–20 detik di Kompas TV, YouTube Shorts                                |
| Reframing Media           | Media memposisikan pernyataan sebagai tidak sensitif, arogan, atau absurd     | <i>Netizen Marah: Hanya Rp2,5 Juta per Hari?</i>                             |
| Rekontekstualisasi Publik | Publik menciptakan satir, meme, dan interpretasi baru                         | Meme <i>Rp2,5 juta vs Upah Buruh</i>                                         |
| Transformasi Makna        | Kata <i>hak</i> berubah menjadi simbol ketamakan elite                        | Meme <i>Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin</i>                                     |
| Penguatan Delegitimasi    | Media dan warganet memperluas kritik menjadi isu moral dan struktural         | Tagar: #TolakTunjanganDPR, #Ngawur50Juta                                     |

Tabel 4 ini menunjukkan bagaimana media nasional dan media sosial berperan dalam memproduksi, menyirkulasikan, dan merekontekstualisasikan ujaran legislator sehingga berubah menjadi objek kritik publik. Media nasional melakukan reframing melalui judul dan potongan video yang menonjolkan aspek kontroversial. Sementara itu, media sosial memperkuat resistensi melalui meme satir dan tagar yang memfasilitasi pembacaan ulang makna secara kolektif. Proses ini mengubah ujaran individual menjadi isu struktural tentang arogansi dan ketimpangan elite.

### 3. Temuan Level Makro: Ideologi, Representasi, dan Konflik Simbolik

Pada level makro, data menunjukkan adanya konflik simbolik antara elite politik dan masyarakat yang semakin tajam. Wacana tunjangan perumahan diresepsi bukan hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai simbol ketimpangan struktural dan penyelewengan moral. Publik memosisikan diri sebagai *rakyat yang dirugikan*, sedangkan legislatif diposisikan sebagai *elite yang mengambil privilese* melalui bahasa yang tidak sensitif dan tidak berempati.

Tabel 5. Data Ideologi dan Representasi

| No | Data / Artefak                                           | Jenis Representasi Makro       |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Frasa legislator <i>hanya kompensasi</i>                 | Minimasi → privilese           |
| 2  | Frasa wajar <i>karena tidak ada rumah dinas</i>          | Normalisasi struktural         |
| 3  | Frasa <i>itu hak</i>                                     | Klaim normatif → entitlement   |
| 4  | Meme <i>Rp2,5 juta per hari vs upah buruh</i>            | Representasi ketimpangan       |
| 5  | Meme <i>Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin</i>                 | Konflik moral & distributif    |
| 6  | Tagar <i>#TolakTunjanganDPR / #Ngawur50Juta</i>          | Resistensi publik              |
| 7  | Headline media: <i>Ujaran Ngawur Adies Kadir</i>         | Delegitimasi performatif       |
| 8  | Liputan protes di Jakarta & daerah                       | Bukti konflik sosial nyata     |
| 9  | Editorial media: <i>Ketidakpekaan DPR di Masa Krisis</i> | Konstruksi ideologi anti-elite |

Ujaran seperti *hanya kompensasi*, *wajar*, atau *hak* dipahami sebagai bentuk bahasa hak istimewa, yaitu bahasa yang memproduksi jarak sosial dan menegaskan privilese kelas politik. Dalam konteks sosio-ekonomi yang sedang sulit, klaim-klaim tersebut terbaca sebagai pelanggaran terhadap norma moral tentang keadilan distributif. Kemunculan protes fisik dan digital menunjukkan bahwa wacana dapat berfungsi sebagai pemicu konflik sosial yang lebih luas.

Pada level ideologis, publik mengonstruksi DPR sebagai lembaga yang kehilangan kepekaan dan akuntabilitas. Sebaliknya, para legislator menempatkan diri dalam kerangka legal dan administratif, tanpa mempertimbangkan implikasi moral dan simbolik. Ketegangan ideologis inilah yang menjadi inti krisis legitimasi.

Tabel 6. Level Makro: Ideologi, representasi, Konflik, dan Simbolik

| Aspek Makro         | Temuan Utama                                                      | Contoh Data                   | Interpretasi Ideologis                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Representasi Elite  | Elite diposisikan sebagai arogan, tidak peka, mengambil privilese | <i>Hak, hanya kompensasi</i>  | Bahasa mengonstruksi jarak sosial dan superioritas                    |
| Representasi Rakyat | Rakyat diposisikan sebagai pihak dirugikan, korban ketimpangan    | Meme upah buruh vs Rp2,5 juta | Publik membangun identitas moral kolektif sebagai pihak yang dizalimi |

| Aspek Makro                  | Temuan Utama                                                     | Contoh Data                                   | Interpretasi Ideologis                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ketimpangan Struktural       | Tunjangan dibaca sebagai simbol ketidakadilan sosial-ekonomi     | Meme Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin             | Kebijakan teknis berubah menjadi isu moral dan politik |
| Konflik Simbolik             | Wacana memicu pertentangan elite vs rakyat                       | Tagar #TolakTunjanganDPR                      | Bahasa memicu mobilisasi resistensi                    |
| Penyempitan Moral dan Empati | Legislator dipersepsi kehilangan empati dan akuntabilitas        | Headline: <i>Tidak Tepat di Tengah Krisis</i> | Diskursus moral menonjolkan kegagalan representasi     |
| Delegitimasi Institusional   | DPR direpresentasikan sebagai lembaga yang tidak layak dipercaya | Editorial media kritis                        | Konflik makro mengarah ke krisis legitimasi nasional   |

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada level makro, wacana tunjangan DPR membentuk pertentangan ideologis antara elite dan rakyat. Bahasa yang digunakan legislator seperti hak, wajar, atau kompensasi dipahami publik sebagai simbol privilese dan ketidakpekaan, sehingga menciptakan representasi elite sebagai arogan dan rakyat sebagai pihak yang dirugikan. Melalui media dan praktik digital seperti meme dan tagar, konflik ini semakin mengeras dan berubah menjadi resistensi moral kolektif. Proses tersebut memperlihatkan bahwa isu teknis tunjangan telah bergeser menjadi konflik simbolik yang merusak legitimasi institusional DPR.

#### 4. Sosiokognitif: Model Mental Publik dan Reframing Kolektif

Analisis berbasis model sosiokognitif van Dijk memperlihatkan bahwa kegagalan strategi retorik para legislator bersumber dari ketidaksesuaian antara ujaran mereka dan model mental publik tentang keadilan, empati, dan kepantasan. Publik menyimpan skema kognitif bahwa anggota DPR adalah aktor elite yang telah menikmati banyak fasilitas, sehingga klaim tambahan seperti *hak* atau *wajar* secara otomatis dipersepsi sebagai bentuk ketamakan.

Tabel 7. Data Sosiokognitif

| No | Data / Artefak                                      | Indikasi Model Mental Publik                  |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Frasa legislator <i>Itu hak</i>                     | Dibaca sebagai ketamakan, bukan hak sah       |
| 2  | Frasa: <i>wajar karena tidak ada rumah dinas</i>    | Ditafsirkan sebagai pembenaran privilese      |
| 3  | Meme: <i>Rp2,5 juta per hari vs gaji guru/buruh</i> | Publik membandingkan ketimpangan              |
| 4  | Meme: <i>Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin</i>           | Menguatkan narasi ketidakadilan               |
| 5  | Tagar: #TolakTunjanganDPR                           | Resistensi kolektif                           |
| 6  | Tagar: #DPRPuraPuraTidakTahu                        | Pembentukan citra moral negatif               |
| 7  | Komentar warganet                                   | Ekspresi emosi negatif (marah, kecewa, sinis) |
| 8  | Riwayat skandal DPR sebelumnya                      | Memori sosial memperkuat bias negatif         |
| 9  | Berita kenaikan harga & krisis ekonomi              | Konteks penderitaan kolektif                  |

Model mental publik tentang penderitaan ekonomi, kenaikan harga, pengangguran, ketidakpastian finansial, menjadi latar bagi interpretasi kolektif terhadap ujaran elite. Memori sosial tentang skandal politik sebelumnya juga memperkuat pola penafsiran negatif. Akibatnya, pemaknaan publik bergerak dari entitlement (*hak sah*) menuju greed (*ketamakan*) secara cepat dan masif.

Meme, parodi, dan tagar menjadi media penting dalam proses ini. Artefak digital tersebut berfungsi sebagai alat kognitif kolektif yang menyebarkan, memperkuat, dan memantapkan model mental bersama. Dalam ruang digital, frasa-frasa seperti *Rp2,5 juta per hari* atau *hak DPR* bertindak sebagai skrip kognitif yang memicu reaksi emosional dan moral. Temuan sosiokognitif menunjukkan bahwa krisis legitimasi tidak hanya berasal dari ujaran, tetapi dari tabrakan antara bahasa elite dan skema kognitif publik yang tidak kompatibel.

Tabel 8. Analisis Sosiokognitif (Model Mental Publik dan Reframing Kolektif)

| Sosiokognitif                         | Temuan Utama                                        | Contoh Data                              | Interpretasi Kognitif Publik                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Model Mental tentang Elite DPR        | Elite = kelompok privilese, tidak peka              | <i>Itu hak, wajar</i>                    | Publik memaknai sebagai ketamakan dan pengabaian realitas sosial   |
| Skema Kognitif tentang Ketidakadilan  | Ketimpangan sebagai kerangka berpikir utama         | Meme upah buruh vs Rp2,5 juta            | Publik membingkai ulang ujaran sebagai bentuk eksploitasi          |
| Memori Sosial Politik                 | Skandal masa lalu memperkuat bias negatif           | Kasus korupsi DPR terdahulu              | Publik cepat menolak klaim legitimasi karena memori buruk kolektif |
| Emosi Publik                          | Kemarahan & sinisme mendominasi                     | Komentar di Twitter/Instagram            | Afek negatif mempercepat delegitimasi                              |
| Reframing Kolektif                    | Ujaran → simbol ketamakan → krisis legitimasi       | Meme <i>Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin</i> | Proses penafsiran ulang bersifat cepat, viral, dan massal          |
| Artefak Digital sebagai Alat Kognitif | Meme, tagar, parodi menjadi medium penyebaran skema | #TolakTunjanganDPR                       | Artefak digital memperkuat makna bersama melalui humor & kritik    |
| Ketidacocokan Bahasa-Kognisi          | Bahasa elite tidak sesuai dengan ekspektasi publik  | <i>Hanya kompensasi</i>                  | Diskoneksi ini menjadi sumber utama delegitimasi                   |

Tabel 8 menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara bahasa elite dan model mental publik menjadi sumber utama delegitimasi. Publik memaknai ujaran seperti hak, wajar, dan kompensasi melalui skema kognitif tentang ketidakadilan, memori skandal politik, dan pengalaman krisis ekonomi. Reframing kolektif melalui meme dan tagar memperkuat persepsi bahwa DPR tidak sensitif dan tidak bermoral. Proses kognitif ini mengubah ujaran administratif menjadi simbol ketamakan, sehingga mempercepat krisis legitimasi.

## Pembahasan

### Bahasa hak istimewa dan kegagalan strategi legitimasi

Temuan pada level mikro, meso, makro, dan sosiokognitif secara konsisten menunjukkan bahwa krisis tunjangan perumahan DPR bukan semata persoalan nominal, melainkan kegagalan bahasa hak istimewa (language of entitlement) dalam konteks krisis sosial-ekonomi. Secara teoritis, strategi normalisasi, minimisasi, dan legitimasi yang digunakan para legislator sejalan dengan apa yang dideskripsikan Schäfer (2024), Bates (2023), dan Said (2024) sebagai teknik wacana umum dalam politik neoliberal: privilese yang luar biasa dibingkai sebagai hal yang biasa, legal, dan administratif. Namun, dalam kasus ini, strategi-strategi tersebut tidak bekerja sebagaimana diharapkan.

Di level mikro, leksikon seperti hanya, wajar, kompensasi, dan hak dirancang untuk menurunkan persepsi ancaman dan memindahkan wacana dari ranah moral ke ranah teknis. Akan tetapi, kata-kata tersebut justru menjadi pemicu resistensi karena bertentangan dengan pengalaman sehari-hari publik mengenai kesulitan ekonomi, stagnasi pendapatan, dan ketimpangan kesempatan. Di sinilah tampak relevansi pandangan Fairclough bahwa teks tidak pernah berdiri sendiri; maknanya dibentuk oleh praktik diskursif dan praktik sosial yang mengitarinya. Ketika wacana elite diproduksi dalam situasi krisis, kata yang secara semantik netral pun dapat terbaca sebagai bentuk arogansi struktural.

Temuan ini memperlihatkan bahwa legitimasi tidak bisa ditopang hanya oleh klaim legal *sudah diatur* atau normalisasi teknis (*Rp50 juta hanya Rp2,5 juta per hari*). Legitimasi mensyaratkan kesesuaian antara bahasa elite dan model mental publik tentang keadilan dan empati. Ketika kesesuaian itu runtuh, strategi diskursif berubah menjadi bumerang yang mempercepat delegitimasi, sebagaimana terlihat dalam pergeseran makna hak dari *hak sah* menjadi *ketamakan*.

### **Delegitimasi multisitus dalam politik yang termediatisasi**

Temuan level meso menegaskan pentingnya melihat krisis ini sebagai produk dari politik yang sangat termediatisasi. Media tidak sekadar menyalurkan pernyataan legislator, tetapi secara aktif melakukan reframing melalui pemilihan headline, pemotongan klip video, serta penonjolan bagian-bagian yang paling kontroversial. Hal ini sejalan dengan konsep delegitimasi multisitus Rahimi (2024), di mana erosi kepercayaan terjadi sekaligus di berbagai arena: media arus utama, media sosial, dan percakapan keseharian.

Di media sosial, rekontekstualisasi berlangsung lebih radikal. Meme yang membandingkan *Rp2,5 juta per hari* dengan upah buruh, atau *Hak DPR vs Hak Rakyat Miskin*, mengonstruksi logika visual dan naratif yang mudah dipahami dan diulang. Artefak digital ini berfungsi sebagai *alat kognitif kolektif* yang mempercepat penyebaran skema ketidakadilan. Dalam perspektif van Dijk, meme dan tagar tersebut dapat dibaca sebagai mekanisme produksi dan distribusi model mental bersama tentang identitas elite dan rakyat.

Dengan demikian, delegitimasi DPR tidak hanya dihasilkan oleh teks orisinal, tetapi oleh rangkaian praktik diskursif yang memperluas cakupan dan intensitas kritik. Hasil ini memperkuat argumen Moffitt (2024) dan Zhang (2024) bahwa media sosial memperbesar amarah populis melalui logika viralitas, afek, dan polarisasi. Kontroversi tunjangan DPR menunjukkan bagaimana beberapa detik ujaran dapat dipotong, diparodikan, dan akhirnya berfungsi sebagai simbol nasional ketidakadilan.

### **Kerentanan politikus selebritas dan logika budaya populer**

Studi ini juga memperlihatkan secara empiris bagaimana identitas selebritas menjadi faktor penting dalam proses delegitimasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun politikus karier dan selebritas sama-sama menggunakan strategi normalisasi dan legitimasi, reaksi publik terhadap kelompok kedua jauh lebih keras dan bernuansa satir. Nama-nama seperti Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Uya Kuya tidak pernah dilepaskan dari persona keartisannya; meme dan komentar warganet secara konsisten menggabungkan citra hiburan dengan ucapan politik mereka.

Temuan ini mengonfirmasi literatur tentang politik selebritas (Allen, 2023; Peterson, 2024; Abidin, 2025) yang menekankan dua sisi identitas populer: meningkatkan visibilitas, tetapi sekaligus meningkatkan kerentanan. Di satu sisi, latar

belakang hiburan memberi mereka modal atensi dan kedekatan dengan publik. Di sisi lain, publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap transformasi identitas dari *artis* menjadi *wakil rakyat*. Ketika yang tampak justru pembelaan terhadap privilese, kekecewaan yang muncul berlipat ganda karena pengkhianatan terhadap narasi kedekatan sebelumnya.

Dalam kasus ini, politikus selebritas berfungsi sebagai *kanvas* tempat publik memproyeksikan kemarahan mereka terhadap seluruh kelas politik. Ujaran mereka menjadi lebih mudah diparodikan karena terkait dengan format budaya populer (komedi, sinetron, reality show). Dengan demikian, studi ini memperkaya kajian tentang politik sebagai fandom dengan menunjukkan bagaimana logika penggemar dapat berbalik menjadi logika anti-fandom ketika ekspektasi moral dilanggar.

### **Bahasa, kognisi sosial, dan krisis legitimasi**

Analisis sosiokognitif memperdalam pemahaman tentang mengapa strategi retorik tersebut gagal. Publik tidak memproses ujaran dalam ruang hampa, tetapi melalui lensa penderitaan ekonomi, memori skandal politik, dan narasi ketidakadilan struktural yang telah lama beredar. Skema kognitif ini membuat setiap klaim tambahan tentang *hak* atau *kompensasi* segera ditempatkan dalam kerangka *elite serakah vs rakyat tertindas*.

Kontribusi penting studi ini adalah menunjukkan bagaimana frasa yang secara semantik netral dapat mengalami pergeseran makna sistematis (entitlement → greed) ketika bertemu dengan model mental tertentu. Pergeseran ini bukan sekadar kesalahpahaman individual, melainkan hasil dari proses reframing kolektif yang dimediasi oleh artefak digital. Dalam perspektif van Dijk, hal ini menggambarkan bagaimana struktur wacana dapat memperkuat atau menantang ideologi dominan melalui pengelolaan ingatan sosial dan emosi publik.

Dengan demikian, krisis legitimasi DPR dapat dipahami sebagai titik temu antara tiga dimensi: (1) pilihan linguistik elite yang mengandung bahasa hak istimewa; (2) praktik media yang memperkuat sisi paling problematik dari ujaran tersebut; dan (3) skema kognitif publik yang sudah jenuh oleh pengalaman ketidakadilan. Pertemuan tiga dimensi inilah yang menjadikan kontroversi tunjangan bukan sekadar *bad communication*, tetapi kegagalan struktural dalam manajemen wacana kekuasaan.

### **Kontribusi terhadap Analisis Wacana Kritis dan kajian politik Indonesia**

Dari sisi teoritis, studi ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, bagi AWK, kasus tunjangan DPR memperlihatkan bahwa analisis legitimasi tidak dapat berhenti pada teks dan praktik diskursif, tetapi perlu secara eksplisit memasukkan dimensi sosiokognitif. Integrasi model Fairclough dan van Dijk terbukti produktif untuk menjelaskan bagaimana strategi normalisasi dan legitimasi elite mengalami apropriasi bermusuhan oleh publik.

Kedua, bagi kajian politik selebritas dan demokrasi yang termediatisasi, studi ini menunjukkan bahwa identitas hiburan tidak hanya memengaruhi cara politisi menyampaikan pesan, tetapi juga cara wartawan dan warganet memproses serta mengevaluasi pesan tersebut. Dalam konteks Indonesia, di mana transisi dari dunia hiburan ke politik semakin jamak, temuan ini penting untuk memahami batas-batas simbolik dari *politik populer*.

Ketiga, bagi studi legitimasi politik di Indonesia, penelitian ini menyoroti bahwa kepercayaan terhadap lembaga perwakilan tidak hanya bergantung pada kinerja substantif, tetapi juga pada performativitas linguistik sehari-hari. Cara anggota DPR berbicara tentang hak, fasilitas, dan kompensasi mempengaruhi sejauh mana mereka dipersepsi mewakili aspirasi rakyat atau justru melawannya.

### **Implikasi normatif dan agenda penelitian lanjutan**

Secara normatif, hasil penelitian ini mengandung peringatan bagi aktor politik bahwa di era mediatized politics, setiap ujaran publik adalah tindakan berisiko tinggi. Transparansi kebijakan tanpa sensitivitas linguistik dapat memicu delegitimasi, sama halnya dengan kebijakan yang buruk. Pelatihan komunikasi politik yang berfokus pada empati, keadilan simbolik, dan kesadaran kelas mungkin diperlukan untuk mengurangi jarak wacana antara elite dan publik.

Untuk penelitian lanjutan, beberapa arah dapat dikembangkan. Pertama, memperluas korpus ke kasus-kasus kebijakan kontroversial lainnya (misalnya, kenaikan gaji pejabat, privilese birokrasi, atau kebijakan pemotongan subsidi) untuk melihat apakah pola bahasa hak istimewa dan delegitimasi multisitus ini berulang. Kedua, membandingkan kasus Indonesia dengan negara lain di kawasan Global South guna memetakan pola umum dan kekhasan lokal dalam penggunaan bahasa privilese. Ketiga, menggabungkan AWK dengan analisis kuantitatif korpus media sosial untuk memetakan dinamika temporal produksi dan penyebaran meme, tagar, dan slogan delegitimasi.

Secara keseluruhan, temuan studi ini menegaskan bahwa bahasa bukan hanya cermin kebijakan, tetapi medan utama di mana legitimasi dipertarungkan dan dapat runtuh. Dalam kasus tunjangan perumahan DPR, bahasa hak istimewa yang digunakan para legislator terbukti tidak hanya gagal meyakinkan publik, tetapi justru menjadi katalis krisis legitimasi dalam demokrasi Indonesia yang kian termediatisasi.

### **Simpulan**

Studi ini menunjukkan bahwa kontroversi tunjangan perumahan DPR tahun 2025 merupakan krisis legitimasi yang dipicu bukan semata oleh kebijakan finansial, tetapi oleh penggunaan bahasa hak istimewa dalam ujaran publik para legislator. Melalui kerangka Analisis Wacana Kritis Fairclough dan model sosiokognitif van Dijk, penelitian ini mengungkap bahwa strategi normalisasi, minimisasi, dan legitimasi yang digunakan para anggota DPR gagal karena bertentangan dengan model mental publik tentang keadilan, empati, dan keadilan.

Pada level mikro, pilihan leksikal seperti hanya, wajar, kompensasi, dan hak menunjukkan upaya sistematis untuk mereduksi skala privilese, namun justru dibaca publik sebagai ekspresi ketidakpekaan moral. Pada level meso, media arus utama dan media sosial memperkuat resistensi melalui reframing, penyebaran klip video pendek, meme satir, dan tagar kritik, sehingga ujaran individual berubah menjadi isu struktural tentang arogansi elite. Pada level makro, wacana ini memproduksi konflik simbolik antara elite dan rakyat, menempatkan DPR sebagai institusi yang tidak peka terhadap penderitaan publik. Analisis sosiokognitif menegaskan bahwa krisis ini diperkuat oleh memori sosial, pengalaman krisis ekonomi, dan skema ketidakadilan yang telah mengakar, sehingga makna ujaran bergeser dari entitlement (hak) menjadi greed (ketamakan).

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa legitimasi politik dalam demokrasi yang termediatisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan substantif, tetapi juga oleh performativitas linguistik para elite. Ketidakesesuaian antara bahasa politik dan model mental publik dapat memicu delegitimasi multisitus yang berlangsung cepat, viral, dan emosional. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memperluas kajian tentang wacana politik dan politik selebritas di Indonesia, tetapi juga memberikan peringatan penting bahwa bahasa memiliki kekuatan menentukan dalam menjaga atau meruntuhkan legitimasi institusional.

## Referensi

- Abidin, C. (2025). *Celebrity politicians and digital publics*. Singapore: Media Studies Press.
- Allen, D. (2023). Celebrity politics and democratic visibility. *Journal of Political Communication*, 40(2), 145–167.
- Bates, T. (2023). Minimisation discourse in neoliberal governance. *Critical Policy Studies*, 17(3), 289–305.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Moffitt, B. (2024). Populist affect and the dynamics of digital outrage. *Media, Culture & Society*, 46(1), 22–41.
- Peterson, M. (2024). Performing politics: How celebrity identities shape legislative communication. *International Journal of Cultural Politics*, 19(1), 75–98.
- Rahimi, S. (2024). Multisite delegitimation in mediatized politics: A framework for analyzing institutional trust erosion. *Discourse & Society*, 35(2), 210–229.
- Reuters. (2025). Indonesia debates housing allowances for legislators amid economic strain. *Reuters News Archive*.
- Said, A. (2024). Legalistic justification and moral detachment in political speech. *Journal of Language and Politics*, 23(4), 512–533.
- Schäfer, L. (2024). Normalising privilege: Linguistic strategies of political elites in contested policy debates. *Discourse & Communication*, 18(1), 5–28.
- Tempo. (2025). Polemik tunjangan DPR dan reaksi publik. *Tempo.co*.
- The Guardian. (2025). Indonesia's parliament faces backlash over housing allowance approval. *The Guardian Asia Edition*.
- van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and power*. New York: Palgrave Macmillan.
- Zhang, H. (2024). Viral anger, algorithmic amplification, and digital political participation. *New Media & Society*, 26(7), 1395–1412.